

ISSN: 0216-0243

JURNAL FILSAFAT

DRIYARAKARA

Th. XXXII no.3/ 2011

FILSAFAT PANCASILA



JURNAL FILSAFAT

DRIYARAKARA

FILSAFAT PANCASILA

Daftar Isi

Pengantar redaksi	1
Peta Permasalahan Pancasila Dewasa Ini ANTONIUS WIDYARSONO	5
PANCASILA: Makna dan Tantangannya sebagai Dasar Negara BENYAMIN SAM	17
Pendidikan bagi Kepribadian Bangsa Indonesia ANDREAS YAN	29
Hubungan Agama dan Negara dalam Pandangan Sila Pertama Pancasila SIPRIANUS S. SAGOROUJOU	39
Kebebasan Ahmadiyah dalam Kacamata Pancasila I. V. EKO ANGGUN S	53
Pancasila dan Masalah Multikulturalisme YUDI PRIYANTO	69
Multikulturalisme dalam Masyarakat Plural DOMINGGUS ARIANTO BERE DINA	83
Demokrasi dan Pemilu Indonesia LAMBERTUS BERTO TUKAN	95
ARTIKEL LEPAS:	
SEMAR: Kebijakan Hidup Jawa YOHANES DAMASCENUS ANUGRAHBAYU	107
AIDS Drug as an Unregulated Commodity: Unravelling the Limits of the Current Patent Laws H. ANGGA INDRASWARA	123

PANCASILA: MAKNADAN TANTANGANNYA SEBAGAI DASAR NEGARA

BENYAMIN SAM¹

Abstrak: Tulisan ini hendak menjelaskan secara singkat bagaimana pentingnya Pancasila sebagai pengikat keindonesiaan kita. Selain sebagai pemersatu bangsa yang di dalamnya tak teringkari keanekaragamannya, Pancasila menjadi jiwa dari segala praktik, tindakan, sikap, serta kebijakan yang diambil oleh segenap masyarakat bangsa Indonesia. Inilah makna Pancasila. Namun dalam praktiknya selama ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara lebih banyak kehilangan makna itu. Berbagai peristiwa seperti kekerasan, ketidakadilan sosial, korupsi, serta berbagai bentuk diskriminasi telah menghilangkan makna luhur Pancasila. Semua ini menjadi noda dan sekaligus tantangan bagi pengejawantahan Pancasila. Maka, dibutuhkan kesadaran akan luhurnya nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, pendidikan karakter sangat dibutuhkan.

Kata-Kata Kunci: Pembudayaan Pancasila, Membangun Kesadaran, Pendidikan Karakter

Pengantar

Bagi Bangsa dan Negara Indonesia, keberadaan Pancasila merupakan hal yang sangat penting karena merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa. Dikatakan sebagai jiwa dan pandangan hidup bangsa karena ia mendasari setiap kebijakan serta tindakan praktis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila menjadi berarti karena ia menjadi muara dan titik pijak perilaku hidup sebagai bangsa yang utuh. Sungguhkah demikian? Seharusnya demikian. Tetapi, fakta menunjukkan bahwa dalam perjalanan waktu, kadang ditemukan aneka sikap serta tindakan dari segelintir orang yang bertentangan dengan pemahaman Pancasila. Marilah kita memandang penuh harapan bahwa itu semua bisa

dikatakan sebagai tantangan yang kalau dihadapi dengan bijaksana, akan memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apa arti dan makna Pancasila sebagai dasar negara dan apa saja tantangannya? Pertanyaan ini akan menjadi dasar pembahasan dalam seluruh tulisan ini. Segala uraian serta pemaparan yang ada dalam seluruh bagian tulisan ini pada akhirnya bertujuan untuk menggali arti atau makna Pancasila sebagai dasar negara secara lebih dalam.

Tulisan ini terdiri dari berapa bagian yang saya anggap penting untuk tujuan tadi. Bagian-bagian itu meliputi arti Pancasila sebagai dasar negara, pengejawantahannya dalam kehidupan sosial dan politik, serta kasus-kasus yang menunjukkan penyimpangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Paling tidak dengan dipaparkannya sekilas tentang pokok-pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini, pembaca mempunyai gambaran akan apa yang akan dibahas oleh penulis. Intinya, sebagaimana telah saya katakan pada bagian sebelumnya bahwa seluruh pembahasan dalam tulisan ini bertujuan untuk menemukan makna terdalam dari Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, tujuan yang diharapkan oleh penulis melalui tulisan ini adalah agar pembaca semakin menghayati Pancasila sebagai jiwa dari setiap tindakannya yang tentunya lahir dari rasa cinta kepada negara tercinta ini.

Arti Pancasila sebagai Dasar Negara

Kiranya bukan kebetulan jika *founding fathers* bangsa ini menjadikan atau meletakkan Pancasila sebagai dasar negara ini. Hal ini berarti bahwa sebelum mereka mencapai suatu kesepakatan final yakni Pancasila sebagai dasar negara, mereka mempertimbangkan segala aspek yang memungkinkan Pancasila sebagai dasar negara. Aspek yang saya maksud adalah masa depan bangsa. Dalam hal ini, saya berpikir tentang kesatuan atau keutuhan kita sebagai bangsa yang di dalamnya ada keragaman yang tidak bisa ditolak. Saya sangat bangga dengan perjuangan *founding fathers* ini. Akan tetapi, ada saat di mana saya merasa sedih ketika masih ada segelintir orang yang berusaha merusak kesatuan yang telah dibangun ini. Contoh nyata yang masih sering terjadi adalah adanya diskriminasi.

... Pancasila mewakili keindonesiaan kita yang majemuk.

Terhadap keberadaan (kedudukan) Pancasila, pertanyaan yang muncul adalah *apa arti atau makna Pancasila sebagai dasar negara? Mengapa memilih Pancasila sebagai dasar negara?* Sebelum membahas pertanyaan pertama, saya akan membahas terlebih dahulu pertanyaan kedua. Pancasila dipilih sebagai dasar negara ini karena sesuai dengan alam kejiwaan bangsa kita, seperti yang dikatakan oleh Soekarno, “*Sudah jelas, kalau kita mau mencari dasar yang*

statis, maka dasar yang statis itu haruslah terdiri dari elemen-elemen yang ada jiwa Indonesia(nya).” Ernest Renan mengatakan, “Setiap bangsa mempunyai satu jiwa” (*une nation, est une ame*).³ Bangsa Indonesia pun mempunyai satu jiwa yang tentunya berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kalau demikian, apa jiwa bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia mempunyai satu jiwa yang disebut Kepribadian Bangsa Indonesia yang termanifestasi dalam Pancasila.⁴

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, *apa atau seperti apakah kepribadian bangsa Indonesia? Apa ciri atau corak kepribadian bangsa Indonesia?* Menurut saya, jawabannya hanya satu yakni terletak pada keanekaragamannya, dan dalam keanekaragaman itu, kita bersatu sebagai satu bangsa. Dengan demikian, Pancasila mewakili keIndonesiaan kita yang majemuk. Bisa dibayangkan apa jadinya kalau Indonesia menjadi negara agama. Artinya, setiap kebijakan, ketentuan, hukum atau peraturan apa pun harus bertitik pijak dari suatu agama tertentu (katakanlah agama mayoritas). Jika demikian, di mana tempat bagi agama-agama minoritas, dan apa artinya pluralitas agama? Sama sekali tak berarti. Yang berarti hanyalah agama tertentu yang dipakai sebagai dasar dari suatu negara, sedangkan agama-agama lain sama sekali tak berarti apa-apa. Jika demikian, yang terjadi pastilah disintegrasi bangsa.

Kembali lagi ke pertanyaan pokok pertama tadi, apa artinya Pancasila sebagai dasar negara? Penetapan Pancasila menjadi dasar negara berarti pertama-tama negara yang dibangun itu adalah negara Pancasila, yang harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan.⁵ Konsep Negara Pancasila berarti bahwa kehidupan suatu negara, termasuk di dalamnya adalah peraturan, undang-undang, hukum harus bertitiktolak dan bermuara dari Pancasila. Dengan kata lain, kehidupan suatu Negara harus sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Negara Pancasila perlu dipandang sebagai negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa (*kemanusiaan yang adil dan beradab*) agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (*keadilan sosial*).⁶

Dari uraian-uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa arti Pancasila sebagai dasar negara adalah negara harus menjadikan

... mengakui Pancasila sebagai dasar negara berarti menyadari tugas bersama untuk menghidupkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila sebagai titik tolak dan pedoman hidupnya. Tugas menghidupkan Pancasila sebagai dasar negara adalah kewajiban semua orang yang termasuk bagian dari keluarga besar Indonesia yang beragam ini. Dengan demikian, mengakui Pancasila sebagai dasar negara berarti menyadari tugas bersama untuk menghidupkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila baru akan mendapatkan artinya dalam pengejawantahannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengejawantahan Pancasila sebagai Dasar Negara

Dalam pembahasan sebelumnya, saya sempat mengatakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara akan bermakna kalau semua nilai yang terkandung di dalamnya terejawantah dalam tindakan praktis berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, fakta menunjukkan kepada kita berbagai persoalan yang marak terjadi dewasa ini, seperti ketidakadilan sosial yang terwujud dalam bentuk diskriminasi. Ironinya, tindakan diskriminasi ini tidak hanya dilakukan oleh warga, melainkan juga kadang (ada kesan) dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat tertentu (*baca*: orang-orang yang dirugikan oleh kebijakan atau peraturan-peraturan tertentu dari pemerintah).

Fakta adanya diskriminasi merupakan bentuk penyelewengan atau pendegradasian terhadap Pancasila sebagai dasar negara ini. Kita menyadari bahwa Pancasila memuat kandungan nilai-nilai luhur yang universal.

Adanya kasus seperti ini memunculkan pertanyaan, *inikah bentuk pengejawantahan Pancasila sebagai dasar negara? Atau, bukankah itu adalah bentuk penyelewengan terhadap Pancasila sebagai dasar negara?* Seandainya penyelewengan terjadi sebagai akibat dari pemahaman yang salah tentang Pancasila, apakah nilai-nilai yang terkandung dalamnya (bisa diandaikan) tidak

luhur dan mendasar? Sejak berdirinya republik kita ini, bangsa Indonesia (melalui *founding fathers*) sudah merumuskan nilai-nilai dasar kehidupan kolektifnya dalam sila-sila Pancasila.⁷

Nilai-nilai dasar itu tentu mencakup hak-hak asasi manusia. Artinya bahwa nilai-nilai ini pada dasarnya menghargai hak-hak asasi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, apa pun latar belakangnya. Fakta adanya diskriminasi merupakan bentuk penyelewengan atau pendegradasian terhadap Pancasila sebagai dasar negara ini. Kita menyadari bahwa Pancasila memuat kandungan nilai-nilai luhur yang universal. Maka, keliru kalau Pancasila dianggap sebagai sumber munculnya berbagai konflik. Masalah yang sebenarnya terjadi adalah terletak pada aktualisasi atau konkretisasinya (nilai-

nilai itu) dalam tindakan praktis.⁸ Pengejawantahan Pancasila sebagai dasar negara tidaklah mulus, selalu mendapat tantangan. Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas bagaimana Pancasila sebagai dasar negara itu terejawantah dalam kehidupan sosial dan politik.

Dalam Kehidupan Sosial

Pancasila akan tetap menjadi konsep belaka yang mengawang selama dalam praksisnya, ia tidak dapat menjiwai kehidupan masyarakat. Selo Soemardjan dengan gamblang mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidak akan dapat hidup dengan lestari dan jaya apabila Pancasila hanya menjadi jiwa bangsa dan negara saja dan tidak meresap ke dalam jiwa masyarakatnya.⁹ Artinya, Pancasila sebagai dasar negara menemukan artinya tidak ketika ia hanya menjadi ideologi yang mengawang, melainkan lebih dari itu adalah ketika ia dikongkretkan atau diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa Pancasila hendaknya meresapi jiwa masyarakat.

Dalam pedoman penataran Pancasila, ada butir yang mengatakan bahwa apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata dan tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, lambat laun pengertiannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur.¹⁰ Bahkan, bahaya yang lebih parah adalah terjadinya disintegrasi bangsa. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana kalau *founding fathers* tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar negara di tengah fakta keberagaman. Apa yang terjadi? Sudah pasti bahwa Indonesia yang seperti sekarang ini, yang *Bhinneka Tunggal Ika*, tidak terwujud.

Fakta bahwa sampai saat ini Indonesia tetap menjadi bangsa yang bersatu mau menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudah terealisasi walaupun belum sempurna atau masih mengalami ketimpangan. Terhadap pencapaian ini (Indonesia yang bersatu), patutlah kalau kita bersyukur. Akan tetapi, rasa syukur ini harus dirayakan. Bagaimana merayakan rasa syukur ini? Tidak lain adalah terus berjuang menghidupkan Pancasila sebagai dasar negara dalam tindakan praktis. Maksudnya, Pancasila harus membudaya atau dalam bahasa Selo Soemardjan adalah *pembudayaan Pancasila*.¹¹ Pembudayaan Pancasila harus diterapkan dalam tindakan praktis. Kehidupan sosial yang harmonis akan terwujud bila semua warga masyarakat menghidupkan Pancasila dalam tindakannya.

Tak dapat disangkal bahwa realisasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sosial kerap dihadapkan pada banyak tantangan serta usaha segelintir orang untuk melawan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, tidak salah kalau mengatakan bahwa Pancasila telah berhasil

direalisasikan dalam kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini diwujudkan dengan persatuan menjadi satu bangsa yang mengikat secara damai beberapa ratus suku yang kini dinamakan suku bangsa.¹²

Dalam Kehidupan Politik

Bagaimana realisasi Pancasila dalam kehidupan berpolitik? Atau, apa yang dimaksud dengan realisasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan politik? Realisasi Pancasila dalam kehidupan politik yang dimaksud adalah bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita.¹³ Artinya bahwa Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang universal harus menjadi referensi dari kehidupan perpolitikan bangsa ini. Kebijakan atau sistem politik yang ada mesti berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara. Tidak hanya itu, segala kebijakan, sistem atau praktik politik itu haruslah bertujuan untuk mencapai nilai-nilai dalam Pancasila. Dengan perkataan lain, kehidupan politik itu hendaknya mendapatkan jiwa atau semangatnya *dari* Pancasila yang tujuannya adalah *untuk* (menjunjung tinggi) Pancasila sebagai dasar negara. Jika kedua unsur ini (*dari dan untuk*) diabaikan, kehidupan politik akan kehilangan arahnya.

... kehidupan politik itu hendaknya mendapatkan jiwa atau semangatnya dari Pancasila yang tujuannya adalah untuk (menjunjung tinggi) Pancasila sebagai dasar negara.

Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana realisasi Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia dewasa ini? Sudahkah ia selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara? Tetap harus diakui bahwa kebijakan-kebijakan serta praktik-praktik perpolitikan di Indonesia dewasa ini masih timpang. Masih banyak hal yang harus dibenahi. Saya tidak akan membahas hal ini pada bagian ini. Namun, intinya adalah bahwa dalam perjalanannya, kehidupan politik

Indonesia kadang diwarnai oleh ketimpangan-ketimpangan itu. Akan tetapi itu bukan suatu kegagalan dalam arti bahwa politik Indonesia gagal total. Hal demikian kadang dilihat sebagai tantangan yang menjadikan kehidupan politik ini menjadi semakin dewasa dan berkembang.

Tanpa mengabaikan fakta yang tadi saya anggap sebagai tantangan yang mematangkan jati diri perpolitikan bangsa ini, kiranya tidak salah kalau saya mengatakan bahwa aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan politik di Indonesia berhasil atau selaras dengan tujuan yang terkandung dalam Pancasila. Sadar atau tidak sadar Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Namun, dalam kemajemukan itu, kita bersatu sebagai satu bangsa. Sungguh

suatu yang indah orang bersatu dalam keragamannya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah demokrasi yang sudah mewarnai kehidupan politik di Indonesia dan sedang berjuang untuk semakin matang.

Suasana kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan ini mengandung dasar-dasar demokrasi bangsa kita yang dapat dipakai sebagai sendi sistem politik nasional.¹⁴ Semangat kebersatuan dan demokrasi adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua hal ini tersimpul dalam dua dari lima sila, yaitu sila ketiga tentang persatuan dan sila keempat tentang musyawarah/ mufakat atau demokrasi.¹⁵ Makna persatuan dan demokrasi sangat penting dalam kehidupan bersama. Jika persatuan dan demokrasi sedemikian penting dalam kehidupan politik atau bidang-bidang lainnya, tidak bisa tidak kedua hal ini harus dijunjung tinggi. Demokrasi Pancasila bukanlah suatu sistem politik yang sempurna, tetapi bagi bangsa kita, ia adalah sistem politik yang terbaik atau paling pas untuk membangun kekuatan politik yang bersatu dan demokratis.¹⁶ Dengan menyadari pentingnya persatuan dan demokrasi, kita akan termotivasi dan terdorong untuk memperbaiki serta membenahi segala kekurangan yang ada dalam bidang politik.

Ketidakadilan Sosial: Penyimpangan Terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara

Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Pancasila menemukan arti atau maknanya bukan hanya terletak pada bagaimana ia menjadi sebatas konsep yang dimiliki oleh negara, dalam arti tidak menyentuh kehidupan praktis. Akan tetapi, arti Pancasila sebagai dasar negara juga harus terlihat dalam pelaksanaannya, pengamalannya dalam kehidupan. Maksudnya, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu mesti diterapkan dalam tindakan praktis. Apa artinya kalau satu negara memiliki konsep atau ideologi yang baik tentang nilai-nilai luhur yang mencakup martabat semua manusia, kalau tindakan praktis menyimpang dari nilai-nilai itu?

Menurut hemat saya, salah satu ukuran untuk menilai apakah Pancasila sebagai dasar negara sudah tertanam dan terejawantah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu keadilan sosial? Franz Magnis-Suseno mendefinisikan keadilan sosial

Hal ini tentu saja tidak dimengerti hanya soal keadilan dalam arti ekonomi (soal harta). Keadilan yang dimaksud tentu mencakup seluruh bidang kehidupan manusia seperti hak-hak asasi atau martabat manusia.

sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat.¹⁷ Fokus saya dalam bagian ini adalah membahas ketidakadilan sosial sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap Pancasila yang masih sering terjadi di Indonesia. Keadilan sosial merupakan salah satu nilai dasar yang termuat dalam Pancasila, yakni dalam sila kelima (*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*). Hal ini tentu saja tidak dimengerti hanya soal keadilan dalam arti ekonomi (soal harta). Keadilan yang dimaksud tentu mencakup seluruh bidang kehidupan manusia seperti hak-hak asasi atau martabat manusia.

Di banyak tempat, tidak jarang terjadi peristiwa yang menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial masih terjadi dan terus terjadi. Bentuk ketidakadilan sosial adalah diskriminasi. Diskriminasi sangat cocok untuk mengakomodasi ketidakadilan sosial. Tindakan diskriminasi mewujud dalam berbagai kejadian, baik dalam kaitannya dengan (kebebasan) agama maupun juga dalam kaitannya dengan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam kaitannya dengan agama misalnya adalah larangan terhadap keyakinan tertentu atau perusakan sarana ibadat aliran kepercayaan tertentu. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan seluruh rakyat misalnya fakta adanya kemiskinan. Selanjutnya, saya akan membahas dua hal ini.

Dalam Kaitan dengan Agama/ Keyakinan

Setiap kali terjadi tindakan diskriminasi terhadap agama atau aliran kepercayaan tertentu dalam bentuk apa saja, pertanyaan yang kerap muncul dalam benak saya adalah mengapa semua ini terjadi dan berulang kali terjadi? Di mana peran pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa? Tidak dapat disangkal bahwa tindakan diskriminasi kerap terjadi antara warga (mayoritas) dengan warga (minoritas). Saya melihat bahwa kadang pemerintah secara tidak langsung berperan terhadap munculnya tindakan diskriminasi itu.

Ada satu contoh kasus yang memperlihatkan hal yang saya maksudkan di atas tadi. Contoh yang saya maksud adalah soal *izin membangun rumah ibadat*. Dalam banyak kasus, surat izin dari pemerintah (setempat/ daerah) untuk membangun rumah ibadat dari agama/ aliran tertentu sulit didapat bahkan tidak dikeluarkan. Namun, ada rumah-rumah ibadat dari agama tertentu lain yang begitu mudah mendapatkannya. Terlihat jelas ada unsur diskriminasi dalam hal ini. Menurut saya, kekerasan dalam masyarakat bisa muncul dari hal ini. Tidak dikeluarkannya izin membangun rumah ibadat oleh pemerintah akan memberi kesan bahwa pemerintah belum (tidak) mengakui keberadaan agama itu. Hal ini tentunya memunculkan anggapan dari orang-

orang tertentu bahwa mereka yang tidak diizinkan oleh pemerintah setempat untuk membangun rumah ibadatnya adalah sesat, lalu muncul kekerasan. Dengan demikian, diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan tertentu (dalam kaitannya dengan kasus tadi) seakan-akan mendapat legitimasinya dari pemerintah.

Selain kasus ini, ada juga problem lain yang dibuat oleh pemerintah yang berpotensi memicu terjadinya diskriminasi, yakni keberadaan Departemen Agama. Dari namanya saja sudah terlihat ada unsur diskriminasi

sebab tidak ada tempat dalam lembaga ini (negara) bagi aliran-aliran kepercayaan. Ini sama artinya bahwa pemerintah tidak mengakui aliran-aliran kepercayaan dan akhirnya membuat orang menafsirkan bahwa aliran-aliran kepercayaan selain agama-agama yang diakui secara sah itu adalah aliran sesat. Sadar atau tidak sadar, keberadaan lembaga negara ini memang berpotensi melahirkan tindakan diskriminasi. Saya tidak ragu mengatakan bahwa ini adalah penyimpangan terhadap Pancasila. Menurut hemat saya, alangkah lebih baik kalau Departemen Agama diubah namanya menjadi *Departemen Agama dan Aliran Kepercayaan* atau *Departemen Kebebasan Berkeyakinan*. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa (nama) Departemen Agama sangat diskriminatif. Dalam nama ini, tidak ada ruang atau tempat bagi aliran keyakinan atau kepercayaan selain agama-agama yang diakui secara resmi. Bukankah ini menyimpang dari apa yang terkandung dalam Pancasila soal kebebasan beragama dan berkeyakinan? Nah, dengan diubah namanya menjadi *Departemen Agama dan Aliran Kepercayaan* atau *Departemen Kebebasan Berkeyakinan*, semua aliran kepercayaan, apa pun bentuk penghayatannya, secara hukum mendapat tempat dan perlindungannya dalam (oleh) negara.

Menurut hemat saya, alangkah lebih baik kalau Departemen Agama diubah namanya menjadi Departemen Agama dan Aliran Kepercayaan atau Departemen Kebebasan Berkeyakinan.

Dalam kaitan dengan Kesejahteraan Seluruh Rakyat

Tindakan diskriminasi tidak hanya berkaitan dengan kebebasan agama sebagaimana telah saya uraikan di atas. Tapi hal lain yang nyata adalah dalam kaitannya dengan kesejahteraan (yang adil) seluruh rakyat. Dalam hal ini, yang mau saya bahas adalah soal kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu bentuk dari ketidakadilan. Kemiskinan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang bukan merupakan akibat kelemahan manusia secara individual, seperti kemalasan. Akan tetapi, yang dimaksud adalah kemiskinan yang bersifat

Mengapa ada daerah tertentu yang jauh lebih maju (karena selalu mendapat perhatian pemerintah) sementara ada daerah tertentu yang jauh tertinggal, tak diperhatikan (oleh pemerintah)? Bukankah sama-sama berada dalam satu bangsa yang satu dan sama, yang berkepribadian dan berkejiwaan Pancasila?

struktural, yang melekat pada kelas-kelas sosial atau golongan-golongan tertentu.¹⁸ Kemiskinan struktural artinya, orang-orang itu miskin bukan karena kelemahan atau nasib individual yang buruk, tapi sebagai akibat struktur-struktur sosial yang menentukan kehidupan golongan mereka.¹⁹ Kemiskinan struktural hampir sekaligus merupakan suatu ketidakadilan struktural.²⁰

Dalam kaitan dengan kemiskinan seperti ini, saya melihat ada diskriminasi di dalamnya, secara khusus dilakukan oleh pemerintah. Saya berani mengatakan demikian karena fakta menunjukkan hal itu. Sebagai contoh, ada daerah yang jauh lebih maju secara ekonomi, pembangunan dalam segala bidang lancar, sarana-sarana yang dibutuhkan masyarakat pun lengkap. Akan tetapi, ada daerah-daerah tertentu yang sangat miskin, sarana transportasi tidak ada, akses untuk berhubungan dengan dunia luar tidak ada. Ada kesan seolah-olah mereka itu bukan bagian diri negara ini. Seolah-olah kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia yang termuat dalam Pancasila hanya tertuju kepada daerah-daerah tertentu (yang jauh lebih maju). Pemerintah sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Di mana keadilan itu, yang seharusnya diterima oleh semua warga negara?

Contoh yang nyata adalah di Mentawai, khususnya daerah yang dilanda tsunami akhir bulan Oktober 2010 lalu. Kita tentu masih ingat bagaimana media massa memberitakan kesulitan untuk menyalurkan bantuan kepada korban karena akses untuk masuk ke daerah itu susah. Sarana transportasi tidak ada. Tentu ada banyak daerah lain di pelosok nusantara ini yang sama dengan daerah yang disebut tadi. Pertanyaannya, di mana keadilan? Mengapa ada daerah tertentu yang jauh lebih maju (karena selalu mendapat perhatian pemerintah) sementara ada daerah tertentu yang jauh tertinggal, tak diperhatikan (oleh pemerintah)? Bukankah sama-sama berada dalam satu bangsa yang satu dan sama, yang berkepribadian dan berkejiwaan Pancasila? Ini adalah diskriminasi, wujud ketidakadilan sosial. Ini adalah bentuk nyata penyimpangan terhadap Pancasila.

Penutup

Pada bagian akhir dari tulisan ini, pertanyaan menggelitik yang kiranya pantas diajukan adalah siapa saja yang terlibat atau seharusnya terlibat dalam usaha untuk menghidupkan nilai-nilai luhur Pancasila? Pertanyaan ini kiranya membutuhkan refleksi yang dalam. Pertanyaan ini sangat terkait dengan identitas atau kepribadian bangsa kita yang majemuk ini. Dengan demikian, tugas untuk menghidupkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila merupakan tanggung jawab semua orang yang menamakan dirinya sebagai orang Indonesia. Tidak bisa tidak, semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meski menyadari tugasnya ini.

Inilah salah satu arti dari Pancasila, yaitu bersama-sama sebagai warga bangsa memperjuangkan nilai-nilai luhur yang universal itu. Hal ini tentunya mengandaikan bahwa semua warga negara sudah menanamkan dalam dirinya suatu kesadaran akan luhurnya nilai-nilai itu bagi martabat manusia. Bahwa nilai-nilai itu begitu determinan dalam kehidupan kita sebagai satu bangsa yang majemuk. Tanpa adanya kesadaran itu, dorongan untuk berusaha pasti tumpul.

Bagaimana membangun kesadaran itu? Apa upaya yang ditempuh agar kesadaran akan pentingnya nilai-nilai luhur itu tertanam dalam jiwa dan semangat kemanusiaan manusia Indonesia? Saya secara pribadi optimis bahwa pendidikan adalah salah satu jalan yang terbaik untuk bisa menumbuhkan kesadaran itu. Pendidikan yang dimaksud tentu bukan hanya pendidikan yang diterima di sekolah. Pendidikan dalam keluarga, masyarakat, institusi agama juga penting dan amat menentukan. Maka, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan karakter yang dapat membangun dan menghargai pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Berkaca dari kenyataan selama ini, salah satu kehilangan besar bangsa ini adalah karakter yang tadi saya maksudkan. Dari masyarakat yang paling bawah sampai pada para pemimpin, karakter ini sesungguhnya tidak kelihatan. Lihatlah, korupsi merajalela, mafia hukum pun bukan praktik baru di negara ini.

Catatan Akhir

- 1 Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara.
- 2 Rozali Abdulah, *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 1-2.
- 3 Abdulah, *Dasar Negara*, 2.
- 4 Abdulah, *Dasar Negara*, 2.
- 5 Kirdi Dipoyudo, *Pancasila: Arti dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 1979), 33.
- 6 Dipoyudo, *Pancasila*, 33.
- 7 Alex Lanur, ed., *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka: Problema dan Tantangannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 11.
- 8 Lanur, ed., *Ideologi Terbuka*, 11.
- 9 Oetojo Oesman, ed., *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), 171.
- 10 Oesman, ed., *Ideologi Dalam Berbagai Bidang*, 172.
- 11 Oesman, ed., *Ideologi Dalam Berbagai Bidang*, 172.
- 12 Oesman, ed., *Ideologi Dalam Berbagai Bidang*, 188.
- 13 Oesman, ed., *Ideologi Dalam Berbagai Bidang*, 190.
- 14 Oesman, ed., *Ideologi Dalam Berbagai Bidang*, 201.
- 15 Oesman, ed., *Ideologi Dalam Berbagai Bidang*, 203.
- 16 Oesman, ed., *Ideologi Dalam Berbagai Bidang*, 232.
- 17 Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1987), 332.
- 18 Magnis-Suseno, *Etika Politik*, 342.
- 19 Magnis-Suseno, *Etika Politik*, 342.
- 20 Magnis-Suseno, *Etika Politik*, 343.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Dipoyudo, Kirdi. *Pancasila: Arti dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 1979.
- Lanur, Alex, ed. *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka: Problema dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Oetojo, Oesman, ed. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1987.